

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Melalui kemajuan teknologi canggih seperti saat ini, informasi bisa kita dapatkan dari berbagai media. Informasi tersebut tidak hanya kita dapatkan melalui media cetak seperti majalah, koran, tabloid maupun media elektronik seperti televisi dan radio melainkan melalui media *online* yang menyajikan berita dan dapat kita akses secara cepat. Pembaca atau penikmat sajian berita dimudahkan dengan berbagai situs yang memiliki konten berita sesuai dengan yang kita butuhkan atau yang sedang kita cari.

Khalayak dapat dengan mudah mendapatkan informasi-informasi terbaru melalui situs-situs atau web seperti perangkat *mobile* dari *handphone* atau *laptop* yang memiliki akses internet. Selain biayanya yang dikatakan lebih terjangkau dari media cetak, aksesnya pun lebih cepat dan dapat dinikmati dimanapun, kapanpun, setiap jam, menit, bahkan detik. Misal seperti media Viva.co.id dan Metrotvnews.com. Dilihat dari nama medianya sudah terlihat jelas bahwa media

tersebut akan menyajikan sebuah informasi secara cepat bahkan dalam hitungan menit. (Kompasiana.com)

Media *online* seperti yang telah kita ketahui saat ini menjadi salah satu media praktis yang digemari oleh masyarakat. Karena dengan adanya media *online* tersebut, kita dapat mengetahui perkembangan yang terjadi setiap menit ataupun detiknya baik dari kancah nasional maupun internasional mengenai berbagai hal dari segi ekonomi, politik, sosial, hukum, budaya dan hiburan. Berdasarkan pernyataan yang telah dikemukakan diatas memberikan suatu arahan bahwa media *online* sama seperti media massa lainnya yang menyajikan informasi kepada khalayak. Namun yang membedakan disini ada pada kecepatan dalam mengakses beritanya sehingga tidak perlu lama menunggu dalam sehari untuk mendapatkan informasi tersebut. Media *online* sama halnya seperti pada media massa lainnya merupakan sarana yang efektif untuk menginformasikan berbagai hal salah satunya mengenai dunia politik.

Komunikasi politik di media massa erat kaitannya dengan opini publik. Dalam komunikasi politik, media massa menjadi penggerak utama dalam usaha untuk mempengaruhi individu terhadap sebuah berita yang diterimanya. Media massa juga menjadi alat yang sering digunakan dalam menyampaikan informasi politik, bahkan dapat dilihat sebagai alat untuk membentuk pendapat dan pemikiran masyarakat (Nimmo,1993:198-200). Pemberitaan media massa memang tidak terlepas dari beragam kepentingan, termasuk kepentingan politik karena didanai dan didukung oleh kekuatan politik tertentu. Adanya kepentingan dari media massa turut mempengaruhi berita yang disampaikan kepada khalayak, dan dari sini maka munculah sebuah realitas bahwa fakta yang disampaikan

bukanlah fakta yang objektif, melainkan fakta yang telah dikonstruksi oleh media atau penulis/wartawan dengan latar belakang kepentingan tertentu (Sudibyo,2001;31)

Lima tahun belakangan ini dunia politik pun telah memasuki ranah media massa untuk mendukung kepentingan-kepentingan tertentu. Saat ini banyak pemimpin perusahaan media massa yang cukup besar di Indonesia masuk ke dalam dunia politik nasional. Seperti korporasi media pertama adalah PT Bakrie Brothers (Grup Bakri) yang dipimpin oleh Aburizal Bakrie yang merupakan politisi senior sekaligus Ketua Umum dari Partai Golkar (Golongan Karya) dan Ketua Presidium Koalisi Merah Putih yang terdiri dari Partai Golkar, PPP, PKS, Gerindra, dan PAN. Group Bakrie ini membawahi beberapa media massa di Indonesia antara lain ANTV (PT Cakrawala Andalas Televisi), Lativi yang sekarang telah berganti nama menjadi TVOne, dan portal media *online* Viva.co.id.

Surya Paloh merupakan pengusaha pers dan pemilik stasiun televisi Metro TV. Namun tidak hanya itu, Surya Paloh juga aktif sebagai politikus dan memiliki harian Media Indonesia, Lampung Post serta portal media *online* Metrotvnews.com yang tergabung dalam Media Group. Didunia politik, mantan Ketua Dewan Pembina Partai Golkar ini mendirikan Partai Nasional Demokrat (Nasdem) dan menjadi Ketua Umum Partai Nasional Demokrat. (sumber:<http://news.detik.com> tanggal 21/05/2014).

Dengan adanya hal seperti ini tentu media massa tidak mungkin netral seutuhnya dikarenakan di media massa tidak terlepas dari beragam kepentingan

politik karena didanai dan didukung oleh kekuatan politik tertentu. Adanya kepentingan dari media massa turut mempengaruhi berita yang disampaikan kepada khalayak, dan fakta yang disampaikan bukanlah fakta yang objektif, melainkan fakta yang telah dikonstruksi oleh media atau penulisnya/wartawan dengan latar belakang kepentingan tertentu (Sudibyo, 2001 : 31).

Pada awal tahun 2015 ini khalayak dikejutkan dengan adanya peristiwa hukum yaitu adanya peristiwa penangkapan Wakil Ketua Lembaga KPK Bambang Widjojanto oleh penyidik Bareskrim POLRI pada Jumat 23 Januari 2015. Hal ini memunculkan adanya banyak dugaan dari khalayak bahwa terjadi kasus kriminalisasi pada Bambang Widjojanto oleh POLRI. Peristiwa ini terjadi pada saat memanasnya konflik antara Lembaga KPK dan POLRI disebabkan penetapan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai tersangka kasus dugaan keterlibatan gratifikasi oleh Lembaga KPK yang pada saat itu sedang dicalon tunggalkan sebagai calon Kapolri baru oleh Presiden Jokowi. Komjen Pol Budi Gunawan merupakan sosok yang termasuk dalam daftar *blacklist* yang diumumkan oleh pihak lembaga KPK sebagai seorang yang tidak direkomendasikan kepada Presiden Jokowi untuk dicalonkan sebagai calon Kapolri. (Sumber : <http://www.viva.co.id> tanggal 23 Januari 2015).

Bambang Widjojanto ditetapkan menjadi tersangka oleh POLRI karena dugaan memerintahkan seseorang untuk memberikan keterangan palsu dalam sidang di Mahkamah Konstitusi dalam kasus sengketa pemilukada Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah pada tahun 2010. Bambang Widjojanto dikenai dengan pasal 242 Juncto 255 KUHP karena memerintahkan seseorang memberi keterangan

palsu di persidangan dengan ancaman tujuh tahun penjara. (Sumber: <http://www.viva.co.id> tanggal 23 Januari 2015).

Kasus ini diduga akibat perselisihan diantara dua lembaga Negara penegak hukum KPK dan POLRI. Maka timbul dugaan usaha melakukan pelemahan dan menghambat pemberantasan korupsi yang kini gencar dilakukan oleh KPK. (Sumber : <http://www.viva.co.id> Tanggal 23 Januari 2015). Bambang Widjojanto mengungkapkan kejanggalan dalam proses penangkapannya, Bambang Widjojanto menuturkan kejanggalan pertama adalah terkait surat penangkapan saat dia ditangkap di mini market usai mengantarkan anaknya sekolah pada Jumat pagi. Dia mengaku pada saat penangkapan itu sempat diperlihatkan surat. Namun, ketika diperlihatkan kembali pada saat proses pemeriksaan, Bambang Widjojanto melihat ada perbedaan didalam surat itu. Kejanggalan selanjutnya, menurut Bambang Widjojanto, adalah terkait pasal yang disangkakan oleh penyidik kepadanya.

Bambang Widjojanto yang diduga telah mengarahkan saksi dalam sidang sengketa pilkada di MK itu dijerat dengan pasal 242 juncto Pasal 55 KUHP Pidana. Namun, menurut Bambang, pasal yang dikenakan itu tidak dijelaskan secara detail oleh penyidik, apakah ayat 1, 2, atau 3. Termasuk juga Pasal 55 yang juga tidak ditulis secara detail. Bambang Widjojanto menolak untuk diperiksa jika pasal yang disangkakan itu tidak dijelaskan detail kepadanya. Ketika kemudian surat penahanan diterbitkan penyidik dan dibuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP), Bambang Widjojanto menolak menandatangani. Bambang sempat menulis argumen-argumen alasan kenapa dia menolak hal tersebut. "Saya kasih argumennya kenapa saya tolak. Pertama, tidak jelas pasal yang disangkakan.

Kedua, kesalahan pada penulisan alamat. Ketiga, saya merasa terteror, BAP penangkapan saya itu tidak memuat detail, saya tidak mau. Saya tolak, terus saya bikin yang detail biar jelas semuanya," kata Bambang. (Sumber : <http://www.viva.co.id> tanggal 24 Januari 2015)

Dilain pihak POLRI mempersilahkan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bambang Widjojanto mengajukan praperadilan, jika keberatan dengan penangkapan yang dilakukan polisi. Kadiv Humas Mabes Polri, Irjen Pol Ronny Sompie mengatakan kalau misalnya tidak puas, ada lembaga praperadilan. "Daripada berpolemik di media, lebih baik pak BW, atau dengan memberikan kuasa, gugat saja di praperadilan", ujarnya. (Sumber : <http://www.viva.co.id> tanggal 25 Januari 2015). Kasus ini menjadi *headline* disemua media massa di Indonesia. Media massa termasuk portal berita Metrotvnews.com dan Vivanews.co.id tidak luput untuk memberitakan peristiwa dugaan kasus kriminalisasi ini. Konstruksi berita yang dilakukan oleh media tersebut salah satunya adalah melakukan pembingkaiian atau *framing*, Ini menarik untuk diteliti bagaimana kedua portal media *online* ini dalam mengkonstruksi dugaan kasus kriminalisasi Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto.

Peneliti memilih media *online* Metrotvnews.com dan Viva.co.id sebagai objek penelitian karena kedua media *online* tersebut berbeda dalam menyikapi peristiwa dugaan kasus kriminalisasi Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto. Media *online* Viva.co.id lebih banyak menonjolkan dan memberitakan kasus ini dari pada media *online* Metrotvnews.com yang lebih sedikit dalam memberitakan kasus Bambang Widjojanto karena dipengaruhi dan memiliki kepentingan politik dilihat dari kepemilikan kedua portal media tersebut. Metrotvnews.com dimiliki

oleh Surya Paloh yaitu salah satu tokoh politik yang tergabung dalam koalisi Indonesia Hebat mendukung pemerintahan Presiden Jokowi, sedangkan Viva.co.id dimiliki oleh Aburizal Bakrie yang sebagai ketua umum Partai Golkar sekaligus Ketua Presidium Koalisi Merah Putih yang menjadi kekuatan penyeimbang dalam pemerintahan Presiden Jokowi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimanakah pembingkaiian berita yang dilakukan portal media online Metrotvnews.com dan Viva.co.id dalam memberitakan dugaan kriminalisasi Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto periode 23 Januari – 29 Januari 2015” ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui dan menjelaskan bagaimana pembingkaiian berita yang dilakukan portal media *online* Metrotvnews.com dan Viva.co.id dalam memberitakan dugaan kriminalisasi Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto periode 23 Januari – 29 Januari 2015.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa manfaat, antara lain :

1. Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah dapat memberi manfaat bagi pengembangan ilmu komunikasi dan juga diharapkan dapat menjadi

refrensi bagi penelitian selanjutnya khususnya bagi pengembangan penelitian yang menggunakan analisis *framing*.

2. Manfaat praktis dari penelitian ini adalah penggambaran bagaimana pemingkaian berita yang dilakukan media *online* dalam memberitakan Bambang Widjojanto. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membawa pencerahan bagi khalayak agar lebih kritis terhadap isi media massa.